

Rudi Sebut Ada TKA Ilegal di Batam

ADIANSYAH-RENGGA
YULIANDRA, Batam Kota

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti melontarkan pernyataan bahwa ada Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak berizin atau ilegal di Batam. Hanya saja dia mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya karena pengawasan tidak pada Disnaker Kota Batam. "Iya, pasti ada (TKA ilegal).

Tapi saya tidak berhak untuk itu (pengawasan), pengawasan di Provinsi (Disnaker Provinsi Kepri," kilah Rudi, Kamis (3/5).

Dia menyebutkan, data TKA di Batam yang tercatat hingga Maret 2018 sebanyak 6.341 orang. Dengan rincian perpanjangan tahun 2017 ada 2.511 orang dan tahun ini sekitar 500 orang. "Walaupun data ini di Batam, tapi ada yang bekerja di daerah lain, seperti di Karimun dan lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, pekerja asing yang bekerja di sektor kasar kini berkurang. Ia mencontohkan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjungkasam, yang semula ada pekerja kelas bawah kini tinggal pekerjaan teknis saja. "Saya bisa jamin itu, tak ada lagi pekerja kasar," katanya.

Sebelumnya, dalam aksi May Day 1 Mei 2018 lalu di depan kantor Wali Kota Batam para

■ Baca RUDI...Hal 13

Ada (TKA ilegal). Pasti ada satu atau dua orang. Tapi saya tidak berhak untuk itu (pengawasan), pengawasan di provinsi (Disnaker Provinsi Kepri),"

RUDI SAKYAKIRTI

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam



F. DOKUMENTASI BATAM POS

Siswa Tinggal Dekat Sekolah Wajib Diterima

Aplikasi PPDB Bisa Diunduh di Playstore

SEKUPANG (BP) - Mulai tahun ajaran 2018-2019, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan sistem zonasi ini, calon siswa yang tinggal dekat lingkungan sekolah wajib diterima.

"Tahun ini kita mulai zonasi. Siswa yang berada di dekat sekolah wajib diterima di sekolah tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Batam Hendri Arulan,

Kamis (3/5).

Mendukung pelaksanaan sistem zonasi tersebut, Disdik Kota Batam tengah

■ Baca SISWA...Hal 13

■ Baca RETRIBUSI...Hal 13

Retribusi PK-5 Bocor ke Oknum dan Preman

BATAM KOTA (BP) - Anggota Panitia Khusus (Pan-sus) Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pedagang Kaki Lima (PK-5) DPRD Batam Erizal Kurai menyebutkan sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi PK-5 sangat minim. Itu karena terjadi kebocoran ke sejumlah oknum pengutip retribusi maupun preman.

■ Baca RETRIBUSI...Hal 13

KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH BATAM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN MEI 2018				
JADWAL SAMSAT KELILING				
NO	TANGGAL	BUS DAMLING	MOBE DAMLING	KETERANGAN LIBUR
1.	02 MEI - 05 MEI 2018	NAGOVA HILL	TOP 100 BENDONG	01 MEI 2018 - HARI BURUH
2.	07 MEI - 12 MEI 2018	KEPRI MALL	TIBAN CENTER	06 MEI 2018 - MINGGU 10 MEI 2018 - KEMUKAN 10 ALMADIN

JADWAL SAMSAT BERGERAK				
NO	TANGGAL	LOKASI	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1.	02 MEI - 05 MEI 2018	KEC. SEKUPANG PASAR MEGA (LEGENDA)	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH
2.	07 MEI - 12 MEI 2018	KEC. BENDONG PASAR MITRA RAYA	08.00 - 12.00 WIB 13.00 - 17.00 WIB	06 MEI 2018 - MINGGU 10 MEI 2018 - KEMUKAN 10 ALMADIN

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU				
WAKTU PELAYANAN	LOKASI	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR	
08.00 - 14.00 WIB	RELAKSI PRASATI (KANTOR KELUARAN TANJUNGPINANG)	12.00 - 13.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH	
08.00 - 14.00 WIB	POS SATPBL PP TANJUNGPINANG PULAU BALANG	12.00 - 13.00 WIB	01 MEI 2018 - HARI BURUH	

JADWAL SAMSAT WAKTU SAMPAI BERUBAH *TANGGAL MENYALIN DAN HARI MINGGU LIBUR**
CP SAMSAT ANTAR PULAU 0811 9535 5276 ***CP SAMSAT BERGERAK 0812 7082 0001***0813 7495 7711 0800 SAMLING DAN 0813 7054 5440 TAMBAH SAMLING
MAKHLUK PELAYANAN: KAMI PERCAYA SIE STIK BERKAITAN DAN BERHAYA DENGAN SUDUSUH-SUDUSUH MEMBERIKAN PELAYANAN
DENGAN AKUNTABEL, TRANSPARAN, TEPAT WAKTU DAN TELITI SERTA BERAS PUNGLI, DEMI TERPULUSNYA PELAYANAN PRIMA POLANTAS

Rudi Sebut Ada TKA Ilegal di Batam

Sambungan dari hal 9

buruh menuntut pemerintah pusat mencabut Peraturan Presiden (Perpres) 20 Tahun 2018 tentang TKA. "Janji pemerintah yang akan membuka tujuh juta lapangan kerja tidak terbukti. Malah kini ada aturan yang mempermudah pekerja asing melalui Perpres 20," kata Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI) Kota Batam Muhammad Mustofa, dalam orasinya.

Alokasi Dana IMTA Tak Sesuai Perda

Sementara itu, ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kota Batam Riky Indrakari menye-

butkan tidak semua retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) disalurkan ke Disnaker Kota Batam. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan TKA sudah menegaskan agar retribusi IMTA untuk Disnaker, dimana 70 persennya untuk pelatihan tenaga kerja lokal. "Ini sudah tahun keempat perda disahkan. Tapi belum sesuai Perda TKA," sesalnya, kemarin.

Diakuinya, sejauh ini baru 70 persen retribusi IMTA ke Disnaker. Itupun termasuk untuk biaya operasional dan belanja pegawai. Sisanya tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Sementara dari 70 persen ini hanya 40 persen saja untuk pelatihan pekerja lokal. Padahal, dana IMTA ini tujuannya untuk men-

support kegiatan terutama yang sifatnya meningkatkan keterampilan dan skill pekerja.

"Kita tanya ke DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sampai saat ini belum ada jawaban. Katanya disebar ke beberapa OPD. Kita minta tertulis," kata Riky.

Pansus juga meminta 30 persen dana IMTA diuraikan. Kemana saja penyalurannya. Pasalnya jika tidak dijelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan, politisi PKS itu menilai anggaran 30 persen terlalu besar untuk biaya operasional dan belanja pegawai.

Selain alokasi dana IMTA, ia juga melihat jumlah TKA di Batam tidak sinkron. Pansus juga meminta agar ada integrasi data antara pemer-

intah dalam hal ini Disnaker, DPM-PTSP, dengan Imigrasi. Hal tersebut untuk menekan adanya TKA ilegal yang masuk. "Perlu integrasi sistem. Imigrasi ada sistem elektronik, jadi tahu siapa saja yang masuk. Batam sebagai daerah perbatasan, selalu ada potensi (TKA ilegal)," katanya.

Memang, diakuinya pengawasan untuk TKA ini berat, apalagi semenjak tim pengawas TKA ada di provinsi. Terlebih lagi setelah adanya bebas viska masuk Indonesia. Jangan sampai, akibat bebas masuk Batam dan negara lain, pemerintah tak bisa membedakan mana turis, dan mana TKA yang masuk Batam.

"Ini yang harus didudukkan bersama. Intinya tak boleh dibiarkan," tegas Riky.***

Siswa Tinggal Dekat Sekolah Wajib Diterima

Sambungan dari hal 9

mempersiapkan aplikasi untuk menghadapi PPDB yang dibuka Juni mendatang. "Teknis (PPDB) sama dengan tahun lalu. Nanti orangtua mendaftarkan anaknya online. Aplikasi nanti bisa diunduh dari *playstore*," ujar Hendri.

Dia menjelaskan untuk aplikasi ada perbedaan dari tahun lalu. Jika sebelumnya dengan sistem rayonisasi, orangtua siswa bisa mendaftar di tiga sekolah, namun tahun ini sudah tidak bisa lagi.

"Aplikasinya masih dalam tahap penyelesaian. Semoga secepatnya selesai," jelasnya.

Untuk itu, sambungnya, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pihak sekolah terkait sistem online dengan zonasi ini. Seperti sebelumnya penerimaan siswa akan dilayani beberapa operator PPDB yang sebelumnya telah diberikan pembekalan.

Sementara itu, Kepala SDN 005 Sekupang Sri Ningsih mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan pihak kelurahan terkait zonasi ini. "Zonasi ini memberikan kemudahan bagi siswa yang tinggal dekat dari sekolah," sebutnya.

Jika yang mendaftar melebihi daya tampung, pihaknya tetap memperhatikan beberapa aspek dalam PPDB, di antaranya segi usia. "Untuk (sekolah) negeri harus tujuh tahun per satu Juni sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka prioritas," ujarnya.

Untuk sistem online, Sri melanjutkan tahun lalu sudah pernah menjalankannya. Namun mengenai sistem terbaru yang akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2018-2019 ini, masih menunggu arahan dari Disdik. "Sosialisasi soal zonasi sudah. Tapi, untuk aplikasi kami masih tunggu," ungkapnya.

Kondisi serupa juga dilakukan pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) 26 Batam. Mereka masih menunggu arahan dari Disdik Kota Batam terkait mekanisme proses PPDB untuk tahun ajaran 2018/2019 mendatang.

"Kami masih menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Belum ada pembahasan khusus terkait ini," ujar Wakil Bidang Kurikulum SMPN 26 Batam Zefmon Prima Putri, kemarin.

Terkait zonasi, pihaknya sudah memetakan jumlah zonasi yang masuk di sekolahnya. Ia menyebutkan ada 13 RW dari Kelurahan Buliang dan 5 RW di Kelurahan Bukit Tempayan. Zonasi tersebut menjadi prioritas mereka. "Ini hasil pertemuan Camat Batuaji bersama Kepala Sekolah se-SMP di Batuaji," katanya.

Sementara untuk daya tampungnya sendiri, Zefmon mengatakan hanya membuka enam lokal saja. Sesuai aturan satu lokal maksimal 36 siswa. "Totalnya ada 216 siswa," sebutnya.

Ia tak memungkiri banyak siswa yang tak tertampung saat pendaftaran nantinya. "Pasti banyak yang tak ter-

tampung. Tapi kami prioritaskan siswa yang dekat dengan sekolah," jelasnya lagi.

Camat Batuaji Ridwan Afandi mengatakan pihaknya memang sudah selesai memetakan zonasi di tiap sekolah yang ada di wilayahnya. Untuk SMP sendiri, semisal SMP Negeri 11 Batam masuk di Kelurahan Buliang dan Bukit Tempayan, SMPN 38 Batam zonasinya ada di Kelurahan Tanjungcang, sementara SMPN 53 Batam masuk di Kelurahan Kibing. "SMP 26 Batam zonasinya sebagian masuk Kelurahan Buliang dan Bukit Tempayan," tutupnya.

Spanduk PPDB Menjamur

Sementara itu, spanduk atau banner iklan liar milik lembaga-lembaga pendidikan semakin menjamur di pinggir jalan jelang PPDB. Di wilayah Batuaji dan Sagulung, iklan liar itu pada umumnya menyorot batang pohon penghijauan dan fasilitas umum seperti halte pemberhentian bus dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Umumnya iklan liar itu adalah promosi sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, ada juga spanduk lembaga simpan pinjam uang, pijat panggilan, rental kendaraan, tempat kursus dan masih banyak lagi promosi-promosi bisnis lainnya.

Di pinggir jalan, spanduk itu diikat di batang pohon secara tak beraturan dan merusak pemandangan. Bahkan iklan

tersebut dipaku secara permanen di batang pohon yang membuat pemandangan jalan jadi tak sedap dipandang. "Paling banyak itu di lokasi dekat sekolah. Karena jelang PPDB, jadi banyak sekolah swasta yang iklan sekolahnya," ujar Erlinda, warga Batuaji.

Dia mengatakan keberadaan spanduk iklan liar itu sangat mengganggu pemandangan, terlebih iklan yang ditempel di pinggir jalan. "Kelihatan semberawut. Tak hanya di pinggir jalan utama, spanduk-spanduk itu juga banyak terlihat di jalan pemukiman warga," sebutnya.

Camat Batuaji Ridwan Afandi mengaku akan segera membersihkan spanduk liar yang menjamur di pinggir Jalan R Soeprapto tersebut. "Iya, segera akan dibersihkan," janjinya. Ia pun mengimbau kepada pelaku usaha atau sekolah untuk tidak memasang spanduk di sembarang tempat, karena merusak pemandangan.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi ketika masih menjadi Wakil Wali Kota Batam pernah melarang keras pemasangan banner iklan di batang pohon penghijauan. Bahkan saat itu Rudi pernah beberapa kali turun langsung mencabut iklan liar tersebut karena dianggap merusak pohon penghijauan.

Namun itu sepertinya sudah lama berlalu dan saat ini iklan-iklan liar itu kembali tumbuh subur di batang pohon dan tanpa ada tindakan tegas lagi. (yui/une)

USBN SD Berjalan Lancar

SEKUPANG (BP) - Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hari pertama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Sekupang berjalan lancar. USBN diikuti 194 murid kelas enam.

"Hari pertama ujiannya Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, siswa terlihat sangat serius dan fokus selama mengerjakan soal," kata Kepala

SDN 005 Sekupang Sri Ningsih, Kamis (3/5).

Pihaknya menyiapkan 10 ruang kelas untuk peserta ujian. Ia mengungkapkan tahun lalu SDN 005 Sekupang menjadi salah satu sekolah dengan raihan nilai USBN terbaik. "Kami berharap tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," harapnya.

Sri menyebutkan untuk

satu kelas diisi 20 siswa dan dua orang pengawas dari luar. USBN akan dilaksanakan hingga 5 Mei mendatang.

Sementara itu, pelaksanaan USBN di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Batam juga berlangsung lancar. USBN diikuti dua siswa penyandang tuna netra dan 13 anak penyandang tuna grahita.

Kepala SLBN Batam Dian

mengatakan khusus untuk siswa yang penyandang tunanetra, pihak sekolah menyiapkan tenaga khusus. "Soal tidak ada menggunakan huruf braille, jadi anak dibantu guru selama proses reading," jelas dia.

Berdasarkan data Disdik Batam, tercatat 21.067 siswa mengikuti USBN baik negeri maupun swasta. Ujian mengujikan tiga mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. (yui)

Digusur Tanpa Ganti Rugi

Kios Liar di Ruang Terbuka Hijau

BATAM KOTA (BP) - Ketua Tim Terpadu Penertiban Kota Batam Syuzairi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pemetaan bangunan liar di ruang terbuka hijau (RTH). Dari pemetaan itu, penertiban kios liar akan dilakukan bertahap. Terutama, pada bangunan atau kios liar yang masih dalam tahap pembangunan yang dipastikan tidak akan mendapatkan ganti rugi.

"Kita akan menertibkan semua bangunan liar di ruang terbuka hijau. Batam ini memang sedang terus melakukan penataan, kita akan memperbaiki indah Batam," kata Syuzairi, Rabu (2/5).

Ia mengatakan, sesuai ketentuan, semua bangunan yang didirikan di pinggir jalan terutama di RTH, memang tidak diperbolehkan. Karena itu, pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi jika ada mau bangun akan langsung kita suguhkan surat perjanjian yang berisi bahwa (bangunan itu bisa langsung dibongkar. Tetapi pada dasarnya, namanya RTH bukan untuk pembangunan kios liar," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean mengatakan pembangunan kios liar saat ini sangat tidak dibenarkan. Apalagi Batam sedang menata pedagang kaki lima. "Kalau memang masih ada yang mau bangun, maka harus dibongkar. Itu tidak boleh lagi. Perda perberdayaan pedagang kaki lima ini sedang digodok," katanya.

Terkait ganti rugi, ia setuju jika memang pemilik kios liar tidak diberikan ganti rugi. Menurutnya, dengan adanya ganti rugi, maka akan semakin banyak yang bangun kios liar. "Nanti pikiran dari oknum untuk membuat kios liar dengan harapan mendapat ganti rugi," katanya.

Kios Liar Ganggu Lalu Lintas

Sementara itu, Kios liar yang berjejer di pinggir jalan R Suprpto persisnya di Simpang Bareleng, Tembesi, Sagulung kembali dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya, kios-kios tersebut terlalu mepet jalan raya sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Pantauan *Batam Pos* di lapangan, jarak antara deretan kios dengan aspal jalan kurang dari satu meter. Itu karena

deretan kios liar yang sudah lama ada itu membangun lapak tambahan untuk usaha mereka sehingga kian mempersempit ruas jalan. Rambu penunjuk jalan yang berjejer di sepanjang jalan, termasuk lampu lalu lintas ikut terhalang lapak tambahan itu.

"Macet terus setiap hari di simpang ini. Sudah begitu tak ada lagi celah buat *nyelip-nyelip* bagi sepeda motor," keluh Osias, warga Tembesi Kebun Sayur, Kamis (3/5).

Warga berharap agar aparat pemerintah terkait secepatnya

menertibkan kios tersebut. Camat Sagulung Reza Khadafi sebelumnya mengaku sudah berulang kali menerima keluhan tersebut. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak sebab kewenangan penertiban ada di Tim Terpadu yang di dalamnya ada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

"Kita sudah berulang kali surati Satpol PP, cuma belum ditindaklanjuti. Pemilik kios juga sudah dikasih peringatan biar bongkar sendiri," ujar Reza. (ian/eja)



PENGUMUMAN LELANG

PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI), sebagai operator dan pemilik jaringan pipa gas dari Grissik-Duri dan Grissik-Singapura, dengan ini mengundang perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan minatnya dalam penyediaan pekerjaan sebagai berikut:

- Nama Pekerjaan** : Pekerjaan Jasa Layanan dan Kebersihan Kantor, Perawatan Gedung dan Administrasi Umum di Wilayah Regional Office 4 Batam.
- Nomor Proyek** : 2018/45/18
- Lokasi** : Seluruh fasilitas TGI yang terdapat di wilayah kerja Regional Office 4 di Pulau Batam, Pulau Tanjung Kubu, Pulau Teluk Dalam, Pulau Lumba Besar, Pulau Pemping dan Jalur Pipa Bawah Laut.
- Periode Pelaksanaan** : 24 (dua puluh empat) bulan kalender
- Kualifikasi Perusahaan** : Perusahaan yang mempunyai pengalaman selama 6 (enam) tahun terakhir dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) di industri minyak dan gas atau tambang atau petrokimia atau pembangkit listrik atau industri lainnya yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia.
- Lingkup Pekerjaan** :
- Menyediakan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di wilayah operasi RO4 untuk menunjang fungsi operasional support dalam mendukung kegiatan operasional dan perawatan asset TGI di wilayah operasi RO4.
 - Mendukung kegiatan swakelola dalam perawatan minor seluruh fasilitas dan asset TGI di wilayah operasi RO4.
 - Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan masing-masing bidang, vendor harus melakukan pengawasan dan bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaan di lapangan.

Pendaftaran untuk lelang ini dilakukan di kantor TGI dengan alamat seperti dibawah pada tanggal 7 Mei 2018 dan 8 Mei 2018 pukul 09.00 - 16.00 WIB.

Kantor Pusat	Kantor Cabang
PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA Head Office Jl. Kebon Sirih Raya No.1 Jakarta Pusat, Indonesia - 10340 Telp. : 021 315 8929/8939 Fax. : 021 310 3757/3545	PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA Regional Office 4 Jl Raya Batam Center (Sebelah Graha Pena) Kel Teluk Tering, Batam 29461 Telp. : 0778 477 555 Fax. : 0778 477 522

Proposal Lelang yang telah diisi dengan lengkap beserta lampiran syarat-syarat lelang diserahkan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 16.00 WIB dan dialamatkan kepada:

PANITIA LELANG
 Pekerjaan Jasa Layanan dan Kebersihan Kantor, Perawatan Gedung dan Administrasi Umum di Wilayah Regional Office 4 Batam
PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA
 Jl. Kebon Sirih No. 1
 Jakarta Pusat-10340

Proposal Lelang tersebut agar dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan disegel kemudian diserahkan ke Panitia Lelang. Proposal Lelang yang dimasukkan sesudah jam dan hari yang telah disebutkan di atas tidak akan diterima.

Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Tender Committee - PT. Transportasi Gas Indonesia, email: TenderTGI@tgi.co.id

Jakarta, 4 Mei 2018

PANITIA LELANG
PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA

Disperindag Janji Awasi Harga Daging

Turunkan Tim Pengawas ke Pasar

TIM BATAM POS, Batam Kota

KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi menegaskan bahwa pihaknya segera turun mengawasi harga daging beku yang mencapai Rp 90 ribu per kilogram (kg).

"Secepatnya kami turun untuk mencari tahu penyebab mahalnya daging sapi beku ini," kata Zaref, Kamis (3/5).

Ia menjelaskan terjadi perbedaan harga di masing-masing pasar tradisional bisa jadi akibat permainan oknum tertentu karena sudah mendekati bulan puasa. "Harusnya harga daging sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 80 ribu per kilogram," sebutnya.

Ia menambahkan tidak semua harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Komoditas seperti sayuran di pasar malah turun harga. "Kami berharap situasi ini tetap walaupun masuk bulan puasa nanti," lanjut mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Batam,

Adisti justru mengaku belum mengetahui kalau harga daging sapi di hampir seluruh pasar di Batam melambung tinggi hingga melebihi HET yang sudah ditetapkan. "Kami belum mengecek harganya. Kami biasanya mengecek harga kebutuhan pokok seperti daging sapi tiap hari Selasa dan Jumat," ujar Adisti, Kamis (3/5) siang.

Masih kata Adisti, dua hari lalu di Pasar Mitra Raya Batam Kota dan Pasar Penuin Baloi, harga daging sapi beku paling mahal dibanderol Rp 83 ribu per kg. Kalau saat ini harga daging sapi sudah mencapai Rp 90 ribu per kg, Adisti mencurigai hal tersebut dimainkan oleh para pedagang di pasar itu sendiri, bukan dari distributornya. "Kalau distributor mereka semua tak ada satupun yang menjual daging sapi di atas HET. Semuanya dijualnya di bawah HET," katanya.

Soal stok daging sapi hingga Idul Fitri nanti, distributor menjamin aman. Tak akan ada kekosongan daging. Begitu juga harga dari distributor akan stabil antara Rp 65 ribu hingga Rp 79 ribu.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Batam yang membidangi ekonomi, Idawati Nursanti meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Disperindag untuk segera turun ke lapangan menggelar sidak harga daging sapi.

"Kalau dari distributor sudah menegaskan tak akan menjual daging sapi di atas HET, berarti tingginya harga daging sapi yang sudah tak wajar itu ulah para pedagang di pasar itu sendiri yang memanfaatkan momen jelang Ramadan dan Idul Fitri," kata Idawati.

Sementara itu, pantauan di Pasar Tiban Center Sekupang, stok kebutuhan sayuran di pasar terlihat cukup jelang bulan puasa. Salah seorang pedagang sayuran, Erni, 45, mengungkapkan pasokan sayuran dari distributor tidak ada masalah. Beberapa kebutuhan sayuran lebih murah dibanding minggu lalu.

"Lagi musim panen, jadi stok melimpah," sebutnya.

Hingga saat ini, belum ada peningkatan permintaan dari pembeli. Menurut perempuan yang disapa uni Eni tersebut,



K. SALLI, HARAPAN BATAM POS

TONI, 38, penjual daging sapi beku di Pasar Fanindo, Tanjungpinang, Batuaji, memotong daging, Senin (19/3) lalu. Disperindag Batam akan turun ke pasar-pasar untuk mengawasi harga daging.

peningkatan permintaan diprediksi mulai terjadi minggu depan. "Karena mulai berburu kebutuhan untuk buka puasa dan sahur," ujarnya.

Adapun, beberapa harga komoditas terpantau stabil. Seperti, bawang merah dijual Rp 24 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 40 ribu per kg, dan cabai rawit Rp 28 ribu. Sedangkan daging sapi beku memang sudah di angka Rp 90 ribu per kg.

Diberitakan sebelumnya, tingginya harga daging sapi di hampir seluruh pasar se-Batam, membuat beberapa distributor

daging sapi seperti PT Batam Frozen Food dan PT Dewi Kartikan Inti tak menyangka harga setinggi itu, padahal dari distributor tak ada kenaikan. Mereka mengajak Disperindag untuk turun sidak harga.

Mereka menduga harga daging sapi beku di atas HET di pasaran akibat ulah pedagang. Distributor juga dirugikan dengan kondisi ini karena tingginya harga daging sapi di pasaran membuat permintaan menjadi turun karena pembeli menahan diri membeli daging yang terlalu mahal. (yui/gas/une/rna)

YAMAHA

Senam Zumba Banjir Hadiah

SEIBEDUK (BP) - Yamaha akan menggelar event nasional tahunan, yakni Bluecore Yamaha Motor Show (BYMS) 2018 di Batam, tepatnya di Panbil Mall, Seibeduk mulai Sabtu (5/5) hingga Minggu (6/5). Dalam acara ini, akan ada servis gratis yakni servis injeksi dan gratis oli.

"Terus, ada lagi aneka perlombaan berupa *fashion show* remaja, *fashion show* cilik, lomba drumband tingkat TK, *test ride* berhadiah dan aneka game serta kuis," kata Wawan, panitia acara.

Dalam rilis yang diterima *Batam Pos*, di acara itu juga akan ada senam zumba berhadiah. Khusus bagi pencinta MotoGP, Minggu (6/5) akan diadakan nonton bareng MotoGP.

Bagi pemilik Aerox, panitia juga mengajak untuk bergabung dideklarasikan Komunitas Club Aerox Batam pada Minggu (6/5). Perlu diingat, semua konten ini adalah gratis alias tak dipungut biaya. Yang menarik bagi calon konsumen, selama berlangsungnya BYMS ini yakni dua hari, panitia atau dealer Yamaha akan memberi banyak penawaran menarik untuk pembelian.

"Selain penawaran menarik saat acara, bila tertarik dan membeli produk Yamaha akan mendapat subsidi dan hadiah elektronik dan *voucher* senilai Rp 200 Ribu," ujarnya.

Tak lupa, *dealer* Yamaha juga akan memperkenalkan produk terbaru dari Yamaha yaitu LEXI 125 VVA dan untuk 100 pemesan pertama mendapatkan harga spesial Rp 19.500.000. (atm)

Retribusi PK-5 Bocor ke Oknum dan...

Sambungan dari hal 9

Menurut anggota Komisi IV DPRD Batam ini, potensi retribusi PK-5 sebenarnya sangat besar. Sebab, sekarang jumlah PK-5 mencapai lebih dari 20 ribu. Oleh sebab itu, keberadaan PK-5 harus diberikan payung hukum dan ditata serta diberdayakan, agar retribusinya terarah langsung masuk ke PAD atau kas daerah.

"Kami dari DPRD ingin menginisiasi agar potensi dari retribusi PK-5 ini bisa masuk ke PAD, tak banyak yang bocor. Maka dibuatlah ranperda PK-5 yang nantinya akan dijadikan perda untuk melindungi potensi kebocoran retribusi dari PK-5. Juga memberikan payung hukum bagi keberadaan PK-5 nantinya," ujar politisi PPP ini.

Dikatakannya, tahun lalu retribusi PK-5 yang masuk PAD sangat kecil. Hanya saja dia tidak hafal rinciannya. "Intinya harus dikelola secara

serius. Potensi PAD dari retribusi PK-5 ini bisa mencapai Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar setahun. Apalagi, sekarang sekitar 90 persen PK-5 berjualan di luar wilayah milik Pemko Batam.

Dalam setahun itu bisa didapat PAD sebesar mulai Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar. PK-5 yang ada di Batam sendiri mayoritas berjualan di luar kawasan milik Pemko atau di luar tanggung jawab dan kewenangan Pemko Batam untuk memungut retribusinya. "Bisa dikatakan 90 persen lebih PK-5 di Batam berjualan di luar kawasan milik Pemko," terangnya.

Erizal kembali menegaskan bahwa selama ini retribusi PK-5 mengalir ke para oknum yang melakukan kutipan langsung ke pedagang. Sehingga, meski jumlah PK-5 di atas 20 ribu, tetap minim kontribusinya yang masuk ke kas daerah, bahkan bisa dikatakan 0,0 sekian persen saja.

Sementara itu, Kabid Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zaenuddin menegaskan, PK-5 binaan Disperindag atau yang berada di bawah kewenangan Pemko Batam untuk kutipan retribusinya jumlahnya sangat sedikit sekali.

"PK-5 dibawah binaan kami hanya ada di Dang Merdu, depan eks My Mart saja. Mereka yang tak menempati di lahan milik Pemko Batam, kami hanya berwenang mendata dan membina saja," ujarnya.

Menurutnya, kalau dikatakan banyak potensi PAD dari PK-5 tak maksimal dan banyak yang menguap atau bocor, tak salah juga. Maka, lanjutnya, selama ini belum dapat mendorong PAD dari sektor retribusi PK-5. "Ya, karena mayoritas PK-5 berjualan di lahan milik swasta, bukan milik Pemko. Jadi kalau ada kutipan retribusinya, itu masuk ke pengelola kawasan atau pemilik lahan, bisa juga ke oknum," sebutnya. (gas)